

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Republik India terletak di kawasan Benua Asia, di daerah yang menyerupai tanjung yang menjorok ke Samudra Hindia (*Indian Ocean*) yang juga sering disebut sebagai sub-kontinen. Wilayah negara India dengan luas mencapai 3.3 juta km<sup>2</sup> berbatasan langsung dengan beberapa negara. Di bagian barat laut dengan Pakistan dan Afganistan, di utara dengan Tiongkok, Bhutan dan Nepal, serta sisi timur dengan Myanmar dan Bangladesh. Sedangkan di sebelah selatan India berbatasan dengan Sri Lanka yang dipisahkan oleh celah laut sempit Selat Malk dan Teluk Mannar (Profile of India, 2022). Dengan letaknya yang menjorok ke Samudra Hindia, India termasuk negara maritim dengan akses yang terbuka untuk berhubungan dengan negara-negara kepulauan di kawasan Asia Tenggara, seperti Indonesia, Thailand, Singapura dan Malaysia, maupun negara-negara di bagian barat laut Samudra Hindia hingga Laut Arab dan negara-negara di pantai timur Afrika.

Jumlah penduduk India pada tahun 2021 menurut perhitungan *United Nations Population Division* mencapai lebih dari 1,3 milyar, atau merupakan penduduk terbesar nomor dua di dunia setelah Tiongkok dengan total penduduk sekitar 1,4 milyar (World Bank, 2022). India mengalami pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dari Tiongkok, yaitu sebesar 0,99 persen per-tahun untuk India dan 0,39 persen per-tahun untuk Tiongkok (Worldometer, 2022). Dengan

pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi, maka diperkirakan India akan mengambil alih Tiongkok sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia dalam waktu dekat. Sebagian besar penduduk India bergantung hidup dari pertanian, yang menyerap sekitar 59 persen angkatan kerja secara nasional (2016), dan menjadi mata pencaharian utama dari sekitar 70 persen penduduk di pedesaan. Lebih dari 80 persen petani di pedesaan dikategorikan sebagai petani kecil dan marjinal (FAO in India, 2022).

Dengan letaknya yang strategis dan secara langsung terhubung dengan negara-negara di daratan Asia maupun melalui Samudra Hindia ke negara-negara pesisir di Timur Tengah, Afrika hingga Asia Tenggara dan Timur, mempermudah hubungan perdagangan, budaya dan agama dari India ke berbagai kawasan tersebut, yang telah berlangsung sejak masa lampau, sebelum era kolonialisme. India adalah sebuah bangsa dengan pengaruh sivilisasi yang dominan di kawasan Asia. Pengaruh India di kawasan ini dapat ditelusuri perkembangan keyakinan Hindu dan Budha yang berasal dari India dan hingga kini masih menjadi agama dan budaya yang dominan, termasuk di Tiongkok. Secara historis, para saudagar India telah mengembangkan hubungan perdagangan rempah-rempah ke berbagai kawasan di Asia hingga Afrika. Pengaruh perdagangan India pada masa lalu ini menginspirasi pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi untuk merevitalisasi *spice route* ke dalam konteks geopolitik dan geoekonomi masa kini, yaitu untuk menyaingi proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) dan *Maritime Silk Road* (MSR) yang telah lebih dahulu dikembangkan Tiongkok. Proyek Musim yang diluncurkan pada tahun 2014 merupakan bagian dari upaya menghidupkan

kembali pengaruh historis India tersebut, melalui fasilitasi penyebaran ide, sistem pengetahuan, teknik dan tradisi di sepanjang alur maritim (Seethi, 2018).

India, sama seperti Tiongkok dan umumnya negara-negara di kawasan Asia dan Afrika, adalah negara-negara bekas jajahan barat, yang selama masa kolonialisme menderita kemunduran hampir di segala bidang. Hubungan perdagangan dan pengaruh sosial-budaya yang telah berkembang pada masa lalu berhenti ketika terjadi penjajahan. India merdeka pada 15 Agustus 1947, setelah sekitar 300 tahun di bawah kolonialisme Inggris. Proses dramatis kemerdekaan India bukan hanya mengenai negosiasi dan perlawanan terhadap Inggris, tetapi juga pertentangan antara warga mayoritas Hindu dan minoritas Muslim. Inggris kemudian memprakarsai pemisahan (partisi), dengan pendirian negara Pakistan untuk menampung warga beragama Islam. Kebijakan partisi India dengan Pakistan ini menyisahkan masalah yang hingga kini menjadi duri dalam daging hubungan antara kedua negara. Masing-masing negara mengklaim penguasaan wilayah Jammu dan Kashmir, dan memicu beberapa kali peperangan India-Pakistan. Persaingan dan ketegangan antara India dan Pakistan masih berlangsung hingga kini, seringkali dengan melibatkan kekuatan lain di luar kawasan yang berkepentingan terhadap konstalasi geopolitik Asia Selatan.

India merupakan negara demokrasi terbesar di dunia, dengan pemerintahan republik yang terbagi dalam 27 negara bagian. Dipimpin Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, dengan ibu kota New Delhi. India menerapkan Politik Luar Negeri non blok (*non allignment*) sejak kemerdekaan, dengan tidak terlibat atau menjadi bagian dari salah satu blok

kekuatan yang bersaing selama masa Perang Dingin. Perdana Menteri India Pertama Jawaharlal Nehru merupakan peletak dasar politik luar negeri non blok, yang masih mempengaruhi kebijakan luar negeri India hingga kini. Pada masa awal kemerdekaan, India bersama-sama dengan Indonesia, Yugoslavia, Mesir dan Tiongkok memelopori gerakan non blok, dimana India menjadi peserta aktif pada Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955. Dengan semangat yang sama sebagai negara-negara yang baru merdeka dari penjajahan dan anti terhadap berbagai bentuk imperialisme dan neo kolonialisme, kelompok negara-negara non blok ini menjadi kekuatan alternatif pada masa Perang Dingin.

Sebagai salah satu pemimpin gerakan non blok, PM Nehru bersemangat mendukung eksistensi gerakan non blok, meskipun ia akhirnya kecewa setelah terjadi perang perbatasan India-Tiongkok pada tahun 1962. Berbagai kekuatan utama dunia, dan termasuk negara-negara non blok dinilai tidak secara jelas memberikan dukungan kepada India. Secara khusus dengan Tiongkok, selain sama-sama sebagai penggerak non-blok, kedua negara juga telah menandatangani Lima Prinsip Perdamaian atau biasa disebut *Panchsheel Agreement* pada tahun 1954 (Krihsnankutty & Shukla, 2020). Kejadian perang yang menyakitkan tersebut menjadi salah satu faktor penting mempengaruhi persaingan, konflik dan saling curiga antar kedua negara hingga kini. Perang perbatasan dengan Tiongkok ini menjadi pelajaran bahwa India perlu terlibat aktif dalam konstalasi politik global untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri dalam sistem hubungan antar negara yang didominasi oleh egoisme kepentingan nasional.

Perubahan kebijakan India yang lebih pragmatis mulai dilakukan pada tahun 1980an, oleh Perdana Menteri Indira Gandhi dan dilanjutkan oleh Perdana Menteri Rajiv Gandhi. Pengembangan hubungan dengan berbagai negara tersebut terutama ditujukan untuk kerjasama ekonomi dan perdagangan, sehingga di dalam negeri dilakukan perubahan kebijakan seperti pengurangan pajak impor yang memberikan kemudahan arus barang dan jasa dari luar ke India. Pada 1988 Perdana Menteri Rajiv Gandhi juga melakukan kunjungan historis ke Tiongkok untuk mencairkan kembali hubungan diplomatik dengan Tiongkok setelah 26 tahun mengalami kebekuan. Kebijakan liberalisasi perdagangan kemudian diperluas oleh pemerintahan Perdana Menteri Narasimha Rao pada 1991, antara lain melalui penghapusan rezim perizinan yang pada masa sebelumnya diberlakukan secara ketat untuk melindungi pembangunan industri di dalam negeri. Dampak dari kebijakan liberalisasi tersebut adalah meningkatnya perdagangan dan investasi asing pada sektor-sektor industri di dalam negeri India, yang kemudian mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibandingkan keadaan sebelum tahun 1980an.

Pada sisi yang lain, Tiongkok pun mengalami kemajuan ekonomi yang pesat, yaitu semenjak Deng Xiaoping memimpin reformasi dan keterbukaan perekonomian Tiongkok pada akhir tahun 1970an. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Tiongkok dan India pun berkembang menjadi raksasa dari *emerging world*, yang digambarkan sebagai munculnya naga dan singa dari Asia. Didukung jumlah penduduk yang berlimpah mencapai sepertiga penduduk bumi, dan dengan menguatnya perekonomian, menjadikan Tiongkok dan India sebagai kekuatan

yang menentukan dalam keseimbangan kekuatan global (Syed & Wals, 2012). Hingga tahun 2021, Tiongkok dan India berada pada urutan 2 dan 5 dari negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Abad 21 pun dijuluki sebagai milenium Asia, dan menjadi pusat rivalitas geopolitik dan geoekonomi yang melibatkan berbagai kekuatan utama dunia.

Sementara itu, meskipun terus menjalin kerjasama ekonomi dan perdagangan, dua kekuatan utama Asia yaitu Tiongkok dan India pun bersaing satu sama lain. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana kedua negara berhadapan melakukan reformasi kebijakan ekonomi dan perdagangan dan mengembangkan ekonomi mereka sejak tahun 1980an. Ketika kedua negara mulai melakukan perubahan, kekuatan ekonomi relatifimbang. Pada tahun 1990, GDP India sebanyak USD 320,98 milyar atau kurang sedikit dari GDP Tiongkok sebesar USD 360,86 milyar. Dari sisi pertumbuhan GDP pada tahun tersebut, India bahkan lebih unggul dengan USD 5,5%, sedangkan Tiongkok sebesar USD 3,9%. Namun pada tahun 2021 situasi berbalik, yang mana kekayaan Tiongkok (nominal GDP) bertumbuh cepat mencapai 5,6 kali lebih besar dari India (The World Bank Group, 2022). Hal ini didukung dengan kenyataan bahwa selama 22 tahun (1961 – 2019) Tiongkok mengalami pertumbuhan ekonomi lebih dari 10%, sedangkan India tidak pernah mengalaminya (Statistics Times, 2021).

Melalui program *Belt and Road Initiative* (BRI) Tiongkok mengembangkan koridor-koridor ekonomi sebagai jembatan untuk menyebarkan pengaruhnya ke berbagai kawasan di dunia. Salah satu koridor BRI yaitu *China-Pakistan Economic Corridor* (CPEC) secara langsung mengancam kepentingan

nasional India, karena melewati Kashmir yang merupakan wilayah konflik antara India dan Pakistan. Tiongkok juga mengembangkan program *Maritime Silk Road* (MSR) yang secara khusus difokuskan kepada pengembangan kerjasama ekonomi dan investasi pada sektor infrastruktur strategis di wilayah maritim di kawasan Asia-Pasifik dan Samudra Hindia. Dengan alasan melindungi kepentingan perdagangan melalui jalur laut, Tiongkok memproyeksikan kekuatan maritimnya melalui penempatan personel militer dan persenjataan pada fasilitas sipil-militer yang dibangun dengan investasi Tiongkok pada kawasan maritim dari Laut China Selatan (LCS) hingga Samudra Hindia. Tiongkok pun menguasai *Sea Lines of Communication* (SLOC) pada jalur laut strategis tersebut, yang mengancam kepentingan India dan berbagai kekuatan utama lainnya di kawasan Indo-Pasifik.

Upaya India untuk mengejar ketertinggalannya dari Tiongkok mulai dilakukan sejak penerapan liberalisasi perdagangan tahun 1990an, dan diikuti dengan kebijakan melihat ke timur (*Look East Policy*) oleh pemerintahan Perdana Menteri Narashima Rao dan kemudian pada tahun 2014 diperkuat dengan *Act East Policy* oleh pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi. Selain untuk mengintegrasikan perekonomian India dengan kawasan Asia Tenggara dan Timur yang mencapai kemajuan ekonomi yang tinggi, kebijakan ini pun hendak menyaingin Tiongkok yang telah lebih dahulu menyebarkan pengaruhnya di kawasan tersebut. Kebijakan untuk mengintegrasikan perekonomian India dengan wilayah Asia Tenggara dan Timur ini bertemu dengan kepentingan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya di kawasan Asia-Pasifik yang hendak memperkuat pengaruh mereka yang tergerus oleh perkembangan ekonomi dan militer

Tiongkok. AS selalu berusaha menjadikan India sebagai mitra strategis, mulai dari perbaikan hubungan AS-India oleh Presiden Clinton, berlanjut dengan peningkatan hubungan kerjasama selama kebijakan *Privot to Asia* pada masa Presiden Barack Obama, hingga terbentuknya kerangka region geopolitik baru Indo-Pasifik pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump.

Konvergensi kepentingan dalam rangka menghadapi Tiongkok menjadi latar belakang terbentuknya kerangka Indo-Pasifik, yaitu sebagai suatu region geopolitik baru yang menghubungkan 2 lautan, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dari visi dan strategi Indo-Pasifik sebagaimana telah diumumkan oleh Jepang, AS, ASEAN dan India menggambarkan bahwa ada kebutuhan dari berbagai kekuatan di Indo-Pasifik untuk mengembangkan kerjasama baru dalam rangka merespon pergeseran geopolitik yang mengancam stabilitas, keamanan dan keterbukaan akses terhadap kawasan maritim strategis sepanjang Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Di balik pergeseran geopolitik tersebut adalah ancaman menguatnya Tiongkok yang dinilai dapat megubah sistem keseimbangan kekuatan yang selama ini didominasi oleh AS.

Bagi India, kerangka Indo-Pasifik dapat digunakan sebagai *external balancing* terhadap kekuatan dan pengaruh Tiongkok. Hal ini dapat dimengerti, karena secara material, Tiongkok telah jauh lebih unggul dari India, sehingga India tidak dapat lagi hanya mengandalkan *internal balancing* (Mohan C. R., 2013). Selain itu, menjadi bagian dari Indo-Pasifik membawa India memasuki kerangka strategis baru yang lebih luas cakupannya, bukan hanya terkait kepentingan ekonomi, melainkan juga membawa India ke dalam kerangka

strategis pertahanan dan keamanan regional, terutama pada *front* maritim yang sejak India merdeka kurang mendapat perhatian. Kerangka Indo-Pasifik juga menempatkan India pada posisi strategis dalam sistem keseimbangan kekuatan regional yang melibatkan kekuatan utama dunia yaitu AS. Secara keseluruhan, kerangka Indo-Pasifik memberi ruang bagi India untuk membangun kerjasama dengan *great power* dunia yang berkepentingan dengan kawasan Samudra Hindia dan Pasifik (Medcalf, *The Western Indo-Pacific: India, China and the Terms of Engagement*, 2016).

Meskipun secara strategis memberikan banyak peluang yang menguntungkan, India memiliki pandangan sendiri mengenai kerangka Indo-Pasifik. India menetapkan visinya sendiri mengenai Indo-Pasifik, yang memberikan gambaran, bahwa India memiliki independensi dan bukan merupakan bagian dari blok di bawah dominasi AS. Visi India di Indo-Pasifik pertama kali disampaikan oleh Perdana Menteri Narendra Modi pada forum *Shangri La Dialogue* di Singapura, bulan Juni 2018. India memandang Indo-Pasifik sebagai region yang bebas, terbuka, dan bersifat inklusif, dan melibatkan semua negara baik yang berada di dalam maupun di luar lingkup geografis Indo-Pasifik. Bahwa region Indo-Pasifik bukanlah arena untuk rivalitas antar kekuatan, melainkan untuk mengembangkan kerjasama untuk kesejahteraan bersama. Sambil menekankan dukungan terhadap sentralitas ASEAN, PM Modi juga menjabarkan bahwa lingkup geografis Indo-Pasifik dalam lingkup kepentingan India yaitu mulai dari pantai timur Afrika hingga pantai barat Amerika (Modi, *Ministry of External Affairs Government of India*, 2018). Visi dan cakupan geografis Indo-

Pasifik sebagaimana disampaikan PM Modi ini menunjukkan bahwa India memiliki agenda dan kepentingan sendiri yang tidak selalu sama dengan agenda dan kepentingan AS ataupun Jepang.

Perkembangan region Indo-Pasifik dari sudut pandang India merupakan proses alamiah yang berkembang sesuai dengan pergeseran geopolitik dan geoekonomi yang menjadikan kawasan Samudra Hindia dan Pasifik sebagai jalur laut strategis dan saling terhubung. Sebagaimana disampaikan Menteri Luar Negeri India, jika kepentingan India bergerak ke timur sejalan dengan kebijakan *Act East Policy*, maka kekuatan-kekuatan lainnya di kawasan Pasifik pun memberikan perhatian ke arah barat (Jaishankar, S., 2022). Dengan kata lain Indo-Pasifik bukan suatu region yang dibentuk melalui tujuan dan strategi tertentu sebagaimana kemauan AS atau Jepang. Sebagaimana penjelasan dari Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar, bahwa Indo-Pasifik sama sekali tidak dimaksudkan untuk membentuk pakta pertahanan seperti NATO di Asia, karena kerangka Indo-Pasifik tidak dibangun berdasarkan mentalitas lama Perang Dingin, melainkan justru untuk meniadakannya (Basu, The Print, 2021).

Meskipun bersaing dengan Tiongkok, pada kenyatannya India tetap mengembangkan hubungan dengan Tiongkok, terutama sebagai mitra perdagangan dan investasi. Sejak perbaikan hubungan diplomatik keduanya, maka kerjasama perdagangan antara kedua negara pun berkembang pesat. Mulai tahun 2008 Tiongkok menjadi *partner* perdagangan barang paling utama India, meski dengan neraca perdagangan yang minus bagi India. Impor dari Tiongkok umumnya berupa komoditas manufaktur seperti mesin, peralatan listrik dan

telekomunikasi. Sedangkan India mengekspor ke Tiongkok berupa barang mentah hasil alam, seperti biji besi dan nikel (Embassy of India, 2022). Selain pengembangan hubungan bilateral, India dan Tiongkok juga menjalin hubungan dan kerjasama multilateral, seperti dalam forum BRICS (Brasil, Russia, India, China, South Africa) dan *Shanghai Cooperation Organization*. India dan Tiongkok juga memiliki agenda yang sama dalam menyuarakan pembaruan tatanan politik global, yaitu agar merefleksikan realitas perimbangan kekuatan baru yang bersifat multipolar.

Kebijakan hubungan luar negeri India secara *multi alignment* ke semua arah, termasuk terhadap pesaing dan musuh AS menjadi sorotan banyak kalangan. Sebagian menilainya sebagai bagian dari kebijakan *strategic autonomy* yang dikembangkan India untuk tidak terikat pada kekuatan manapun, atau disebut sebagai kebijakan *non alignment 2.0*. Sebagian lainnya menilai sebagai *hedging strategy* terhadap Tiongkok, yang mana AS dan sekutunya di Indo-Pasifik dijadikan sebagai jaminan untuk menjaga kepentingan dan posisi India, sambil tetap menjalin hubungan dengan Tiongkok. Sebagian lainnya menilai India bersikap ambivalen atau hanya berdiri di pagar persaingan geopolitik, terutama jika dilihat dari visi AS yang menghendaki Indo-Pasifik menjadi strategi untuk menghadang dan mengembangkan persaingan dengan Tiongkok.

Visi dan kebijakan India di Indo-Pasifik ini terus menjadi pertanyaan dan bahan diskusi, terutama mengenai tujuan dan bagaimana kerangka Indo-Pasifik digunakan untuk mencapai kepentingan nasional India. Pertanyaan-pertanyaan ini terus bermunculan, karena pada saat yang bersamaan India juga mengembangkan

hubungan dengan Tiongkok yang merupakan pesaing yang mengancam dan menjadi alasan yang mendorong pembentukan region Indo-Pasifik. Tentu saja India memiliki tujuan dan strategi, dan untuk itu penelitian ini hendak mencari tahu dan menjabarkannya.

## 1.2 Rumusan Masalah

India dan Tiongkok secara tradisional merupakan dua kekuatan dominan di kawasan Asia, terutama setelah berakhirnya perang dingin, ketika kedua negara telah sama-sama melakukan reformasi dan liberalisasi perekonomian mereka pada tahun 1990an. Namun, Tiongkok mengalami kemajuan ekonomi yang lebih tinggi, yang kemudian diikuti dengan peningkatan kapasitas militer dan proyeksi kekuatan ekonomi dan militer ke berbagai kawasan yang luas. Memasuki abad 21, Tiongkok berubah dari salah satu kekuatan Asia menjadi salah satu kekuatan dunia, dan bahkan berpotensi mengambil alih posisi hegemoni Amerika Serikat (AS). Secara nyata di kawasan Indo-Pasifik, bangkitnya kekuatan Tiongkok ini menyebabkan terjadinya pergeseran keseimbangan kekuatan regional yang mengancam status AS sebagai kekuatan dominan.

Perubahan sistem keseimbangan kekuatan regional karena menguatnya Tiongkok ini tentu saja mendorong India sebagai salah satu kekuatan dominan di Asia untuk mengembangkan kekuatannya untuk mengimbangi Tiongkok. Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian latar belakang, setidaknya terdapat tiga alasan rasional bagi India untuk berusaha mengimbangi Tiongkok. Pertama, Tiongkok merupakan kekuatan yang secara langsung mengancam kedaulatan India karena konflik perbatasan keduanya di kawasan Pegunungan Himalaya.

Kedua, perdagangan asimetris yang saat ini sedang terjadi, jika dibiarkan maka Tiongkok akan makin lebih kuat menekan India pada sektor perdagangan yang pada akhirnya melemahkan kekuatan India. Ketiga, pelaksanaan program BRI dan MSR melalui kerjasama ekonomi dan pembangunan fasilitas infrastruktur pelabuhan dan bandara di Asia Selatan dan kawasan Samudra Hindia secara langsung mengancam kepentingan strategis India sebagai kekuatan dominan di kawasan tersebut.

India merupakan mitra penting dari kerangka Indo-Asifik, baik karena lokasinya yang strategis di Samudra Hindia, maupun karena perkembangan kekuatan ekonomi dan militernya yang dapat menyaingi Tiongkok. Karena lokasinya yang strategis di Samudra Hindia, maka keterlibatan India dalam kerangka Indo-Pasifik sangat menentukan, atau dapat dikatakan, tanpa India maka tidak ada Indo-Pasifik. Bagi Amerika Serikat dan sekutu utamanya di Asia-Pasifik yang sedang terancam posisinya oleh Tiongkok, bermitra dengan India pun sangat menentukan, atau digambarkan sebagai *indispensable partner in 21st century*. Berbagai inisiatif kerjasama pun dikembangkan, termasuk dukungan AS dan sekutunya untuk pengembangan kapasitas ekonomi dan militer India. Bersamaan dengan respon India terhadap menguatnya Tiongkok, kerjasama India dengan berbagai kekuatan yang terancam oleh Tiongkok pun berproses hingga terbentuknya kerangka region geopolitik Indo-Pasifik.

Sementara itu, meskipun kerangka Indo-Pasifik memberikan peluang bagi India untuk melakukan *external balancing* dalam rangka mengatasi dominasi Tiongkok, namun visi dan kebijakan India tidak sepenuhnya *inlign* dengan visi

dan kebijakan AS dan sekutunya di Indo-Pasifik. India tetap mengembangkan *strategic autonomy* dalam kebijakan luar negeri dan menjalin kerjasama secara bebas ke semua arah (*multi Allignment*), termasuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan Tiongkok. Bagi India, meskipun kehadiran dan aktivitas Tiongkok mengancam kepentingan strategisnya, Indo-Pasifik tidak boleh dikembangkan sebagai region geopolitik eksklusif yang ditujukan untuk rivalitas antar kekuatan, melainkan dikembangkan secara inklusif untuk memfasilitasi kerjasama semua negara, dalam rangka menciptakan perdamaian, keadilan dan kesejahteraan bersama.

Sikap dan kebijakan India di Indo-Pasifik yang bersifat ambivalen ini tentu saja didasarkan atas pertimbangan strategis untuk mencapai kepentingan nasional India. Penelitian ini bertujuan mencari tahu tujuan dan strategi India yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1) Mengapa India memilih kerangka Indo-Pasifik sebagai strategi kebijakan luar negeri mereka?; 2) Bagaimana India menggunakan kerangka Indo-Pasifik untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini paling tidak memiliki 3 tujuan:

- 1) Mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ilmu Hubungan Internasional, berkaitan dengan pendekatan dalam memahami dinamika politik internasional karena terjadinya perubahan kekuatan dalam sistem internasional

- 2) Memahami tujuan dan strategi India dalam kaitan dengan keputusannya untuk terlibat di dalam kerangka Indo-Pasifik
- 3) Memahami dan memprediksikan arah konflik dan kerjasama antara India dan Tiongkok dan antara India dan kekuatan Indo-Pasifik lainnya, dan dampaknya terhadap konflik dan kerjasama di kawasan Asia dan Indo-Pasifik pada umumnya

#### 1.4 Signifikansi Penelitian

- 1) Bagi pengambil kebijakan negara di Asia dan di Indo-Pasifik umumnya untuk memahami secara lebih baik kepentingan dan strategi dari masing-masing kekuatan yang terlibat serta persaingan dan kerjasama di antara mereka, sehingga dapat menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi yang tepat dalam pengembangan kerjasama dengan negara-negara yang sedang bersaing dalam konteks Asia maupun dalam konteks Indo-Pasifik
- 2) Membantu penajaman strategi dan tujuan-tujuan dari organisasi-organisasi internasional, dalam kerangka kerja Indo-Pasifik maupun dalam rangka pengembangan politik, keamanan dan kerjasama pembangunan di kawasan Asia maupun secara luas di kawasan Indo-Pasifik
- 3) Sebagai referensi bagi pemerhati, ilmuwan maupun peneliti dan mahasiswa untuk pengembangan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan India-Tiongkok maupun posisi India dalam kerangka Indo-Pasifik pada masa datang